



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor... Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	74.595.911.758,82	
2. Dana Perimbangan	Rp	980.735.199.266,00	
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	199.373.373.550,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.254.704.484.574,82	+

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	600.767.400.034,00	
b) Belanja Bunga	Rp	-	
c) Belanja Subsidi	Rp	-	
d) Belanja Hibah	Rp	13.106.800.000,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	2.907.018.315,75	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	149.578.543.200,00	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	309.763.500,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	766.669.525.049,75	+

2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp	37.522.763.554,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	248.713.278.524,50	
c) Belanja Modal	Rp	194.815.396.237,56	+
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>481.051.438.316,06</u>	
Jumlah Belanja	Rp	1.247.720.963.365,81	
Surplus/(Defisit)	Rp	6.983.387.580,01	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	34.838.379.521,67	
2. Pengeluaran	Rp	00,00	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	<u>34.838.379.521,67</u>	
Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan	Rp	41.821.900.730,68	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2020

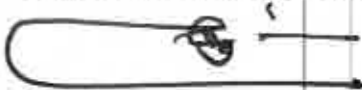
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

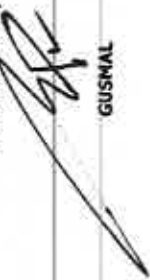
A. RINGKASAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,282,592,257,180.29	1,254,704,484,574.82	97.83	(27,887,772,605.47)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77,449,247,709.29	74,595,911,758.82	96.32	(2,853,335,950.47)
4 1 1	Pajak Daerah	19,235,906,376.00	20,193,380,838.77	104.98	957,474,462.77
4 1 2	Retribusi Daerah	9,344,005,159.40	7,116,946,801.00	76.17	(2,227,058,358.40)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,925,891,952.00	6,917,861,764.00	99.88	(8,030,188.00)
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41,943,444,221.89	40,367,722,355.05	96.24	(1,575,721,866.84)
4 2 1	DANA PERIMBANGAN	1,001,899,356,000.00	980,735,199,266.00	97.89	(21,164,156,734.00)
4 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13,976,850,000.00	9,947,076,013.00	71.17	(4,029,773,987.00)
4 2 1 3	Dana Alokasi Umum	731,032,814,000.00	731,032,814,000.00	100.00	-
4 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	256,889,692,000.00	239,755,309,253.00	93.33	(17,134,382,747.00)
4 2	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	203,243,653,471.00	199,373,373,550.00	98.10	(3,870,279,921.00)
4 2 4 1	Pendapatan Hibah	67,319,563,000.00	64,319,563,000.00	95.54	(3,000,000,000.00)
4 2 4 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
4 2 4 3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
4 2 4 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51,112,084,471.00	50,241,804,550.00	98.30	(870,279,921.00)
4 2 4 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	84,812,006,000.00	84,812,006,000.00	100.00	-
4 2 4 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	1,314,453,761,955.96	1,247,720,963,365.81	94.92	66,732,798,590.15
5 1	Belanja Tidak Langsung	789,650,863,012.96	766,669,525,049.75	97.09	22,981,337,963.21
5 1 1	Belanja Pegawai	621,937,835,247.54	600,767,400,034.00	96.60	21,170,435,213.54
5 1 3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5 1 4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5 1 5	Belanja Hibah	13,521,400,000.00	13,106,800,000.00	96.93	414,600,000.00
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5 1 7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,698,516,405.00	2,907,018,315.75	78.60	791,498,089.25
5 1 8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	149,617,111,360.42	149,578,543,200.00	99.97	38,568,160.42
	Belanja Tidak Terduga	876,000,000.00	309,763,500.00	35.36	566,236,500.00
5 2	Belanja Langsung	524,802,898,943.00	481,051,438,316.06	91.66	43,751,460,626.94
5 2 1	Belanja Pegawai	39,040,138,376.00	37,522,763,554.00	96.11	1,517,374,822.00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	265,418,093,755.00	248,713,278,574.50	93.71	16,704,815,230.50
5 2 3	Belanja Modal	220,344,666,812.00	194,815,396,237.56	88.41	25,529,270,574.44
	Surplus/(Defisit)	(31,861,504,775.67)	6,983,521,209.01	(21.92)	(94,620,571,195.62)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	31,861,504,775.67	34,838,379,521.67	109.34	(2,976,874,746.00)
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34,861,504,775.67	34,838,379,521.67	99.93	23,125,254.00
6 1 1	Penggunaan SILPA	34,861,504,775.67	34,812,232,521.67	99.86	49,272,254.00
6 1 5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	26,147,000.00	-	(26,147,000.00)
6 1 7	Penerimaan Pengembalian Investasi P2KU	-	-	-	-
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	31,861,504,775.67	34,838,379,521.67	109.34	(2,976,874,746.00)
	SISA SELISIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	41,821,900,730.68	-	-
	Koreksi Silpa	-	-	-	-
	SISA SELISIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	41,821,900,730.68	-	-

4 f

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000	-
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD - PDAM	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	41.821.900.730,68	(41.821.900.731)	

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

KABUPATEN SOLOK
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.	BELANJA DAERAH	481,854,602,964.65	464,438,851,999.00	17,415,750,969.65	96,39	
00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	389,367,935,970.65	375,416,621,690.00	13,951,314,280.65	96,42	
00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	389,367,935,970.65	375,416,621,690.00	13,951,314,280.65	96,42	
00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	364,462,852,970.65	351,453,154,540.00	13,009,698,430.65	96,43	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	183,578,847,484.65	181,759,350,998.00	1,819,496,486.65	98,01	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	18,246,563,436.00	18,017,781,686.00	227,781,750.00	98,75	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	227,853,640.00	220,961,340.00	6,892,300.00	96,98	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15,909,876,325.00	15,770,555,400.00	139,320,825.00	98,12	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1,038,360,300.00	1,056,733,000.00	(18,372,700.00)	101,77	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Bers	8,910,976,836.00	8,778,723,432.00	132,253,404.00	98,52	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	747,272,231.00	1,147,672,379.00	(400,400,148.00)	153,58	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	2,608,093.00	2,586,615.00	21,478.00	99,18	
00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	126,381,881,160.00	116,982,561,990.00	9,399,319,170.00	92,56	
00.00.5.1.1.01.27.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2,427,287,500.00	918,287,500.00	1,509,000,000.00	37,83	
00.00.5.1.1.01.28.	Tunjangan Khusus Guru PNSD	6,992,325,965.00	6,797,940,200.00	194,385,765.00	97,22	

34

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00	10,876,400.00	1,123,600.00	90,64	
21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00	10,876,400.00	1,123,600.00	90,64	
21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34,000,000.00	33,850,000.00	150,000.00	99,56	
21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,000,000.00	33,850,000.00	150,000.00	99,56	
21.09.5.2.2.27.	Honorarium PNS/Non PNS	13,750,000.00	12,750,000.00	1,000,000.00	92,73	
21.09.5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/terasumber/pengajar	13,750,000.00	12,750,000.00	1,000,000.00	92,73	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7,804,031,353.00)	(7,285,676,296.00)	(518,355,057.00)	93,36	
	JUMLAH BELANJA	7,804,031,353.00	7,285,676,296.00	518,355,057.00	93,36	

BUPATI SOLOK,



GUSMAL